J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

# Geopolitik Thai Canal: Ancaman Atau Peluang Bagi Strategi Maritim Indonesia

**Dimas Gading Arya Pradana[1], Yusnaldi[2], Rudiyanto[3]**
[1,2,3] Department of Maritime Security, Faculty of National Security, Indonesia Defense University, Bogor, West Java, 16810, Indonesia.
E-mail: dimas.pradana@kn.idu.ac.id[1], yusnaldy@yahoo.com[2], mazz.rudiyanto@gmail.com[3]

**Article History:**
Received: 23 Oktober 2025
Revised: 29 November 2025
Accepted: 05 Desember 2025

**Keywords:** *Thai Canal, Geopolitik, Acaman, Peluang, Strategi Maritim, Indonesia*

***Abstract:*** *Kawasan Asia Tenggara merupakan titik tumpu geopolitik maritim global, dengan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan vital. Wacana pembangunan Thai Canal (Kanal Kra) kembali mengemuka sebagai variabel strategis yang berpotensi mengubah peta maritim dan tatanan kekuatan regional secara fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi proyek tersebut bagi Indonesia, dengan menjawab pertanyaan utama: apakah Thai Canal merupakan ancaman atau peluang bagi strategi Poros Maritim Dunia (PMD)? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis studi kasus deskriptif-analitis dan kerangka teori Mandala Kautilya, penelitian ini mengkaji data dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Thai Canal berpotensi menjadi ancaman signifikan dengan mendegradasi sentralitas geostrategis Selat Malaka, mengikis pengaruh Indonesia di ASEAN, dan meningkatkan kerentanan keamanan akibat proyeksi kekuatan Tiongkok yang lebih leluasa ke Samudra Hindia. Namun, proyek ini juga dapat berfungsi sebagai katalisator strategis, mendorong Indonesia untuk mendiversifikasi infrastruktur maritim, meningkatkan daya tawar diplomasi, dan merevitalisasi visi PMD menjadi lebih fungsional berbasis kapabilitas. Disimpulkan bahwa dampak Thai Canal bersifat dialektis; ia menjadi ancaman jika direspons secara pasif, namun dapat dikonversi menjadi peluang strategis melalui kebijakan yang proaktif dan adaptif. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi strategi maritim Indonesia untuk menghadapi realitas geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik.*

## PENDAHULUAN

Berisi Kawasan Asia Tenggara merupakan panggung utama dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi global abad ke-21. Signifikansi strategis kawasan ini tidak terlepas dari posisinya yang dilalui oleh jalur-jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOCs) paling vital di dunia. Di jantung konektivitas maritim ini terletak Selat Malaka, sebuah titik sempit (choke point) yang menjadi urat nadi perdagangan internasional. Lebih dari 84.000 kapal melintasi selat ini setiap tahunnya, mengangkut sekitar 30% dari total perdagangan barang dunia dan menjadi jalur utama bagi suplai energi ke negara-negara industri di Asia Timur (Laksmana, 2018). Ketergantungan global terhadap Selat Malaka menempatkannya sebagai aset strategis sekaligus sumber kerentanan, di mana setiap disrupsi potensial dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan regional maupun global. Kontrol dan keamanan di selat ini secara historis telah membentuk konstelasi kekuatan di Asia Tenggara dan menjadi fokus utama bagi negara-negara yang berkepentingan.

Di tengah realitas tersebut, wacana pembangunan Thai Canal, atau yang lebih dikenal sebagai Kanal Kra, kembali mengemuka dengan intensitas yang lebih tinggi. Proyek ambisius yang telah diusulkan sejak berabad-abad lalu ini bertujuan untuk membelah Tanah Genting Kra di Thailand selatan, menciptakan jalur air buatan yang menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Thailand. Realisasi kanal ini akan menyediakan rute alternatif yang memotong jarak pelayaran hingga 1.200 kilometer, secara efektif mem-bypass Selat Malaka (Rahmat, 2021). Didorong oleh kepentingan ekonomi dan dukungan finansial, terutama dari Tiongkok melalui kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI), proyek ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah utopia infrastruktur semata. Sebaliknya, ia menjelma menjadi sebuah variabel geopolitik baru yang berpotensi meredefinisi peta maritim Asia Tenggara, mengubah arus perdagangan, dan menggeser pusat gravitasi ekonomi-politik di kawasan.

Perubahan lanskap strategis ini secara langsung bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak tepat di persimpangan jalur maritim global, Indonesia telah mendeklarasikan visi Poros Maritim Dunia (PMD) atau Global Maritime Fulcrum (GMF). Visi ini berupaya mentransformasikan potensi geografis Indonesia menjadi kekuatan maritim yang dominan di tingkat regional dan berpengaruh di tingkat global. Eksistensi PMD sangat bergantung pada sentralitas posisi Indonesia dalam jalur perdagangan dunia, di mana Selat Malaka dan selat-selat strategis lainnya di nusantara menjadi pilar utamanya (Connelly, 2020). Oleh karena itu, kehadiran Thai Canal yang berpotensi mendegradasi signifikansi Selat Malaka menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keberlanjutan dan relevansi strategi maritim yang telah dicanangkan oleh Indonesia.

Untuk menganalisis kompleksitas dinamika ini, kerangka teori Mandala Kautilya menawarkan lensa analitis yang relevan. Teori yang berasal dari risalah kuno India, Arthashastra, ini memandang hubungan internasional sebagai serangkaian lingkaran konsentris kekuasaan (circle of states) yang berpusat pada seorang raja atau negara yang berambisi (vijigishu). Dalam model ini, negara tetangga secara inheren dianggap sebagai rival potensial (ari), sementara negara di seberang tetangga adalah sekutu alami (mitra). Penerapan teori ini dalam konteks modern memungkinkan analisis tentang bagaimana Indonesia (sebagai vijigishu) harus menavigasi hubungannya dengan Thailand (sebagai ari yang berpotensi mengubah status quo) dan kekuatan besar seperti Tiongkok (sebagai kekuatan eksternal yang memengaruhi keseimbangan regional) (Boesche, 2003). Thai Canal, dari perspektif ini, bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah manuver strategis yang dapat mengubah kalkulasi kekuatan di "mandala" Asia Tenggara.

Mengingat potensi disrupsi yang besar terhadap tatanan maritim yang ada dan implikasinya

yang mendalam bagi visi strategis Indonesia, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Apakah realisasi proyek Thai Canal merupakan sebuah ancaman eksistensial atau justru dapat dikonversi menjadi peluang strategis bagi Indonesia dalam konteks persaingan kekuatan besar (great power rivalry) di Indo-Pasifik? Analisis ini akan mengeksplorasi dampak ekonomi, politik, dan keamanan dari proyek tersebut terhadap Indonesia, serta mengkaji opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam tatanan maritim yang baru.

## METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai implikasi geopolitik proyek Thai Canal terhadap strategi maritim Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi fenomena sosial politik yang kompleks, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Fokus penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan makna, persepsi, dan proyeksi strategis dari berbagai aktor terkait isu Thai Canal, sehingga memerlukan analisis yang kaya akan konteks. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif-analitis. Studi kasus memungkinkan penyelidikan intensif terhadap sebuah fenomena kontemporer dalam hal ini, potensi dampak Thai Canal dalam konteks kehidupan nyata yang dinamis (Yin, 2018). Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta dan karakteristik mengenai isu yang diteliti, sementara sifat analitisnya berupaya untuk menguji teori dan memberikan penjelasan kausal mengenai mengapa dan bagaimana fenomena tersebut berimplikasi bagi Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan teknik studi kepustakaan (library research) atau analisis dokumen. Metode ini dianggap paling sesuai mengingat sifat penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan, wacana strategis, dan dinamika geopolitik yang informasinya sebagian besar terdokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk memastikan triangulasi dan validitas data. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah Indonesia, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Cetak Biru Poros Maritim Dunia, pidato kenegaraan Presiden, serta siaran pers dan dokumen strategis dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga terkait lainnya. Dokumen-dokumen ini penting untuk memahami posisi dan kerangka kebijakan resmi Indonesia.

Sementara itu, sumber data sekunder menjadi tulang punggung dari analisis ini. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel dari jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeks Scopus, buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidang geopolitik dan studi maritim, laporan riset dari lembaga pemikir (think tank) terkemuka seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lowy Institute, dan ISEAS Yusof Ishak Institute, serta artikel analitis dari media massa kredibel yang memiliki fokus pada isu-isu pertahanan dan hubungan internasional di kawasan Indo-Pasifik. Penggunaan beragam sumber sekunder ini bertujuan untuk memperoleh perspektif analitis yang kaya, beragam, dan mendalam dari para pakar (Bowen, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis konten (content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis). Analisis konten tematik diterapkan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis pola serta tema-tema kunci yang muncul dari data yang terkumpul, seperti frekuensi penyebutan "ancaman," "peluang," "konektivitas," dan "kedaulatan" dalam dokumen kebijakan dan artikel ilmiah (Braun & Clarke, 2006). Setelah tema-tema utama teridentifikasi, penelitian ini akan menerapkan analisis wacana untuk membongkar makna, asumsi, dan kerangka berpikir yang mendasari narasi yang dibangun oleh

berbagai aktor. Analisis ini akan memeriksa bagaimana isu Thai Canal dibingkai apakah sebagai proyek ekonomi murni, sebagai bagian dari ekspansi pengaruh Tiongkok, atau sebagai tantangan langsung terhadap sentralitas ASEAN. Seluruh temuan dari analisis konten dan wacana ini kemudian akan diinterpretasikan dan disintesiskan melalui kerangka teori Mandala Kautilya. Teori ini akan berfungsi sebagai "lensa" analitis untuk memetakan posisi strategis Indonesia dalam konstelasi kekuatan regional yang berpotensi berubah, serta untuk merumuskan apakah Thai Canal pada akhirnya memperkuat atau melemahkan posisi Indonesia dalam "mandala" geopolitik Asia Tenggara.

## PEMBAHASAN

Bagian Pertanyaan mengenai apakah realisasi proyek Thai Canal merupakan ancaman atau peluang bagi strategi maritim Indonesia tidak memiliki jawaban tunggal. Proyek infrastruktur raksasa ini pada hakikatnya adalah sebuah pedang bermata dua: sebuah disrupsi geopolitik yang berpotensi mendegradasi posisi strategis Indonesia, sekaligus menjadi katalisator yang dapat mendorong Indonesia menuju postur maritim yang lebih dinamis dan resilient. Analisis yang komprehensif menuntut pembedahan mendalam terhadap kedua sisi mata pedang tersebut, dengan menggunakan kerangka kepentingan nasional Indonesia dan dinamika kekuatan regional sebagai pisau analisisnya. Pembahasan ini akan diartikulasikan ke dalam tiga bagian utama: pertama, mengurai bagaimana Thai Canal dapat menjadi ancaman signifikan bagi pilar-pilar strategi maritim Indonesia; kedua, mengeksplorasi potensi peluang yang dapat dimanfaatkan dari perubahan lanskap strategis ini; dan ketiga, mensintesis kedua perspektif untuk merumuskan jawaban dialektis atas pertanyaan penelitian.

### Dimensi Ancaman: Erosi Sentralitas dan Kerentanan Strategis

Ancaman utama dari Thai Canal bagi Indonesia terletak pada potensinya untuk mengikis fondasi paling dasar dari signifikansi geopolitik Indonesia, yaitu sentralitas geografisnya. Visi Poros Maritim Dunia (PMD) atau Global Maritime Fulcrum (GMF) yang dicanangkan Indonesia secara implisit dan eksplisit bertumpu pada keunggulan geografis nusantara yang berada di persimpangan jalur perdagangan dunia, dengan Selat Malaka sebagai arteri utamanya (Laksmana, 2018). Realisasi Thai Canal secara langsung menantang asumsi fundamental ini melalui beberapa dimensi krusial.

1. **Degradasi Signifikansi Geostrategis Selat Malaka dan ALKI I**

Ancaman paling nyata dan langsung adalah pergeseran rute pelayaran internasional. Thai Canal menawarkan pemotongan jarak tempuh sekitar 1.200 kilometer dan penghematan waktu antara dua hingga tiga hari bagi kapal-kapal yang berlayar dari Samudra Hindia ke Laut China Selatan dan sebaliknya. Penghematan biaya operasional, terutama untuk kapal tanker raksasa (Very Large Crude Carriers) dan kapal kontainer ultra besar, akan menjadi insentif ekonomi yang sangat kuat untuk beralih dari Selat Malaka (Rahmat, 2021). Prediksi menunjukkan bahwa setidaknya 20-30% dari total lalu lintas kapal di Selat Malaka dapat beralih ke rute baru ini.

Bagi Indonesia, implikasinya sangat serius. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang membentang dari Laut China Selatan, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, hingga Selat Sunda, memiliki nilai strategis yang sangat terkait dengan volume lalu lintas di Selat Malaka. Penurunan trafik di Malaka secara otomatis akan mengurangi relevansi dan volume di sebagian besar koridor ALKI I. Dampak ekonominya akan terasa di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatra seperti Belawan, Dumai, dan Batam, yang selama ini menikmati keuntungan dari aktivitas ekonomi turunan dari kepadatan jalur pelayaran. Potensi pendapatan dari jasa kepelabuhanan, logistik, perbaikan kapal, dan suplai bahan bakar (bunkering) akan

tergerus secara signifikan. Dengan demikian, Thai Canal tidak hanya mereduksi pentingnya Selat Malaka, tetapi juga mendevaluasi nilai strategis dari salah satu koridor laut terpenting yang menjadi tulang punggung konektivitas maritim internal dan eksternal Indonesia.

**2. Erosi Pengaruh Geopolitik di Kawasan**

Posisi Indonesia sebagai pemimpin de facto di ASEAN sebagian besar ditopang oleh bobot demografis, ekonomi, dan letak geografisnya yang sentral. Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura, secara kolektif berfungsi sebagai "penjaga gerbang" (gatekeeper) antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kontrol atas titik sempit (chokepoint) Selat Malaka memberikan ketiga negara ini daya tawar geopolitik yang luar biasa. Thai Canal berpotensi membongkar tatanan ini dengan menciptakan sebuah poros maritim baru di utara, yang berpusat di Thailand.

Hal ini dapat memicu fragmentasi geopolitik di dalam ASEAN, mempertajam dikotomi antara Asia Tenggara daratan (mainland Southeast Asia) dan Asia Tenggara maritim (maritime Southeast Asia). Negara-negara daratan seperti Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang sudah sangat terintegrasi dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok, akan semakin terkonsolidasi dalam orbit geoekonomi Beijing (Storey, 2020). Sementara itu, negara-negara maritim akan menghadapi tantangan untuk mempertahankan relevansinya. Bagi Indonesia, ini berarti potensi penurunan pengaruh dalam menentukan agenda ASEAN, karena pusat dinamika ekonomi dan strategis regional bergeser ke utara. Isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti keamanan di Laut Natuna Utara, mungkin akan mendapat perhatian yang lebih sedikit dari negara-negara ASEAN daratan yang sibuk menuai keuntungan dari jalur perdagangan baru.

**3. Implikasi Keamanan: Proyeksi Kekuatan Tiongkok di Depan Pintu Indonesia**

Dari perspektif keamanan, Thai Canal adalah sebuah game-changer, terutama dalam konteks rivalitas kekuatan besar. Proyek ini dipandang sebagai solusi Tiongkok atas "Dilema Malaka" sebuah istilah yang merujuk pada kerentanan strategis Beijing akibat ketergantungan masifnya pada Selat Malaka untuk impor energi dan perdagangannya, di mana jalur tersebut dapat dengan mudah diblokade oleh kekuatan rival seperti Amerika Serikat atau India dalam sebuah skenario konflik (Zhao, 2021). Dengan adanya Thai Canal, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN) akan memiliki akses yang jauh lebih cepat dan aman untuk memproyeksikan kekuatannya dari pangkalan di Laut China Selatan ke Samudra Hindia.

Bagi Indonesia, ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Kehadiran angkatan laut Tiongkok yang lebih permanen dan masif di Laut Andaman, yang berbatasan langsung dengan ujung utara Sumatra, akan mengubah kalkulasi pertahanan Indonesia secara fundamental. Hal ini akan memaksa TNI Angkatan Laut untuk merealokasikan sumber dayanya yang terbatas guna meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan barat Indonesia, sebuah teater yang selama ini dianggap relatif lebih aman dibandingkan Laut Natuna Utara. Kemampuan Tiongkok untuk dengan cepat mengerahkan kapal perang dan kapal selam ke Samudra Hindia juga akan mengancam keamanan ALKI I dari sisi barat, menciptakan kerentanan baru yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama para perencana pertahanan Indonesia.

**4. Analisis Ancaman dalam Kerangka Teori Mandala**

Menggunakan lensa teori Mandala Kautilya, posisi Indonesia sebagai vijigishu (negara yang berambisi memperluas pengaruh) dihadapkan pada sebuah manuver strategis oleh negara tetangganya, Thailand (ari). Dalam kerangka ini, tindakan Thailand untuk membangun kanal dengan dukungan kekuatan eksternal yang dominan (Tiongkok) adalah sebuah langkah klasik untuk meningkatkan posisi tawarnya sendiri dan mengurangi dominasi tetangganya yang lebih

besar. Tiongkok, dalam skenario ini, berperan sebagai kekuatan yang membantu ari untuk mengepung vijigishu. Manuver ini secara efektif menciptakan sebuah "lingkaran" ancaman baru di sisi barat Indonesia, mengalihkan sumber daya dan perhatian strategis Indonesia, serta mengurangi kemampuannya untuk fokus pada lingkaran ancaman lain, misalnya di Laut China Selatan. Ini adalah sebuah permainan geopolitik subtil yang bertujuan mengubah keseimbangan kekuatan regional tanpa harus melalui konfrontasi militer langsung.

**Dimensi Peluang: Katalisator untuk Transformasi Strategis**

Meskipun dimensi ancaman tampak dominan, memandang Thai Canal semata-mata sebagai malapetaka strategis adalah sebuah pandangan yang pesimistis dan pasif. Sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa tekanan eksternal sering kali menjadi pendorong paling efektif bagi sebuah negara untuk melakukan reformasi dan inovasi strategis. Dari perspektif ini, Thai Canal dapat berfungsi sebagai strategic shock yang memaksa Indonesia untuk beradaptasi dan pada akhirnya keluar dengan posisi maritim yang lebih kuat dan terdiversifikasi.

1. **Mendorong Pembangunan Infrastruktur Maritim yang Merata**

Ketergantungan berlebih pada Selat Malaka telah membuat pembangunan infrastruktur maritim Indonesia cenderung terpusat di bagian barat. Ancaman penurunan trafik di Malaka dapat menjadi momentum politik yang kuat untuk mengakselerasi pembangunan di koridor maritim lain.

Pertama, penguatan ALKI II (Selat Lombok - Selat Makassar). Jalur ini memiliki keunggulan karena kedalamannya yang mampu mengakomodasi kapal-kapal terbesar sekalipun (post-Panamax) dan lokasinya yang lebih aman dari potensi pembajakan. Pemerintah dapat secara agresif mempromosikan dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang ALKI II, seperti Pelabuhan Benoa di Bali, Pelabuhan Lembar di Lombok, dan terutama menjadikan Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi sebagai hub logistik internasional untuk kawasan timur. Dengan infrastruktur yang memadai, ALKI II dapat dipasarkan sebagai rute alternatif yang efisien dan aman bagi kapal-kapal yang bertujuan ke Australia atau Pasifik Barat.

Kedua, optimalisasi posisi strategis Pelabuhan Sabang. Terletak di ujung utara Sumatra, di mulut Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Laut Andaman, Sabang berada di posisi yang unik. Alih-alih menjadi korban dari Thai Canal, Sabang justru dapat menjadi salah satu penerima manfaat terbesarnya. Sabang dapat dikembangkan sebagai hub transshipment dan pusat layanan maritim (logistik, bunkering, perbaikan) terdepan yang melayani kapal-kapal yang akan memasuki Selat Malaka maupun yang menuju Thai Canal. Kedekatannya dengan kedua jalur tersebut menjadikannya lokasi yang ideal, mengubah potensi kerugian menjadi keuntungan strategis (Bateman, 2017).

2. **Peningkatan Posisi Tawar Diplomasi dan Kerja Sama Keamanan**

Munculnya Thai Canal akan meningkatkan suhu persaingan strategis antara Tiongkok dan kekuatan-kekuatan lain dalam kerangka Indo-Pasifik, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India (koalisi Quad). Kekhawatiran bersama terhadap meningkatnya mobilitas dan pengaruh angkatan laut Tiongkok akan membuat negara-negara Quad semakin berkepentingan untuk memperkuat kemitraan keamanan maritim dengan Indonesia.

Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya. Indonesia dapat memposisikan diri sebagai penyeimbang regional (regional balancer) yang krusial. Dengan menawarkan stabilitas dan keamanan di jalur-jalur lautnya (ALKI I, II, dan III) sebagai alternatif dari koridor Thai Canal yang berpotensi dimiliterisasi oleh Tiongkok, Indonesia dapat menarik investasi dan kerja sama pertahanan yang lebih besar. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk

program modernisasi alutsista TNI AL, peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui transfer teknologi radar dan pengawasan maritim, serta latihan militer bersama yang lebih intensif. Alih-alih terisolasi, Indonesia justru dapat menjadi poros dalam arsitektur keamanan maritim Indo-Pasifik yang baru (Connelly, 2020).

**3. Reorientasi Visi Poros Maritim Dunia dari Geografis ke Fungsional**

Mungkin peluang terbesar yang ditawarkan oleh tantangan Thai Canal adalah kesempatan untuk mengkalibrasi ulang visi Poros Maritim Dunia. Selama ini, visi PMD terlalu sering diartikan dalam kerangka keunggulan geografis yang pasif. Realitas baru menuntut pergeseran paradigma dari geographical maritime fulcrum menjadi functional maritime fulcrum.

Artinya, keunggulan maritim Indonesia di masa depan tidak boleh lagi hanya bergantung pada di mana ia berada, tetapi pada apa yang bisa ia lakukan. Ini berarti fokus pada pembangunan kapabilitas fungsional: efisiensi birokrasi pelabuhan (menekan dwelling time), daya saing biaya logistik, supremasi hukum di laut, keamanan maritim yang handal, serta pengembangan industri maritim yang inovatif (digitalisasi pelabuhan, galangan kapal modern). Jika Indonesia mampu menawarkan layanan maritim yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga, maka sebagian besar lalu lintas kapal akan tetap memilih untuk berlabuh dan berbisnis di Indonesia, terlepas dari adanya rute-rute alternatif baru. Tantangan dari Thai Canal dapat menjadi cambuk yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi struktural di sektor maritim yang selama ini berjalan lambat.

**4. Analisis Peluang dalam Kerangka Teori Mandala**

Dari perspektif Mandala, manuver Thailand dan Tiongkok menciptakan sebuah disrupsi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia (vijigishu). Ancaman dari Tiongkok melalui kanal ini secara otomatis akan mendekatkan negara-negara di lingkaran berikutnya (mitra, atau "teman") dan lingkaran setelahnya (ari-mitra, atau "teman dari musuh") kepada Indonesia. India, yang memandang Samudra Hindia sebagai halaman belakangnya, akan menjadi mitra strategis yang semakin vital bagi Indonesia untuk bersama-sama memonitor aktivitas Tiongkok di Laut Andaman (Brewster, 2019). Demikian pula, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat akan melihat Indonesia sebagai benteng pertahanan maritim yang esensial untuk mencegah dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Indonesia dapat secara cerdas memainkan "kartu" ini untuk membangun aliansi yang lebih kuat, memperoleh dukungan teknologi dan militer, serta memperkuat posisinya di pusat "mandala" geopolitiknya.

**Sintesis: Ancaman sebagai Peluang, Pasif sebagai Risiko**

Setelah membedah kedua sisi, menjadi jelas bahwa Thai Canal bukanlah ancaman atau peluang yang bersifat deterministik. Ia adalah sebuah variabel independen yang dampaknya akan ditentukan oleh variabel dependen, yaitu respons kebijakan dari Indonesia. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian bersifat dialektis: Thai Canal adalah sebuah ancaman eksistensial jika Indonesia tetap pasif, namun ia dapat ditransformasikan menjadi peluang strategis jika Indonesia bersikap proaktif, adaptif, dan visioner.

Jika Indonesia tidak melakukan apa-apa gagal mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Selat Malaka, membiarkan sektor maritimnya tidak efisien, dan lamban dalam diplomasi pertahanan maka skenario ancaman akan menjadi kenyataan. Relevansi geopolitiknya akan terdegradasi, ekonominya akan menderita, dan ruang manuver strategisnya akan menyempit. Dalam kondisi ini, Indonesia akan menjadi korban dari perubahan tatanan maritim regional.

Sebaliknya, jika Indonesia memandang Thai Canal sebagai sebuah wake-up call, sebuah momentum untuk melakukan lompatan strategis, maka skenario peluang dapat diwujudkan.

Dengan mendiversifikasi hub maritimnya, memperkuat aliansi keamanan, dan mereformasi tata kelola sektor maritimnya secara fundamental, Indonesia tidak hanya dapat memitigasi dampak negatif dari Thai Canal, tetapi juga dapat membangun fondasi keunggulan maritim yang lebih kokoh dan tidak hanya bergantung pada anugerah geografi semata.

Kesimpulannya, proyek Thai Canal berfungsi sebagai sebuah ujian litmus bagi ambisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ia memaksa para pembuat kebijakan di Jakarta untuk menjawab pertanyaan fundamental: Apakah visi maritim Indonesia hanya sebuah slogan yang berlandaskan pada kejayaan masa lalu dan letak geografis, atau sebuah cetak biru strategis yang hidup, dinamis, dan mampu beradaptasi dengan badai geopolitik di abad ke-21? Jawaban atas pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah terusan di Tanah Genting Kra itu akan menjadi nisan atau justru batu loncatan bagi masa depan maritim Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi proyek Thai Canal bukanlah ancaman atau peluang yang bersifat deterministik bagi Indonesia, melainkan sebuah katalisator strategis yang dampaknya sangat bergantung pada respons kebijakan yang diambil oleh Jakarta. Proyek ini secara fundamental menantang asumsi sentralitas geografis yang selama ini menjadi pilar utama visi Poros Maritim Dunia (PMD). Jika Indonesia bersikap pasif, Thai Canal akan menjadi ancaman serius yang mengerosi signifikansi geostrategis Selat Malaka dan ALKI I, mengurangi pengaruh geopolitik Indonesia di ASEAN, serta menciptakan kerentanan keamanan baru di sisi barat akibat peningkatan proyeksi kekuatan Tiongkok di Samudra Hindia.

Namun, disrupsi ini juga dapat ditransformasikan menjadi peluang strategis. Ancaman terhadap status quo dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi infrastruktur maritim secara lebih merata, memperkuat posisi tawar dalam diplomasi pertahanan dengan kekuatan Indo-Pasifik lainnya, dan yang terpenting, mereorientasi visi PMD dari keunggulan geografis yang pasif menjadi keunggulan fungsional yang aktif dan kompetitif. Pada akhirnya, Thai Canal adalah sebuah ujian geopolitik: apakah Indonesia akan menjadi korban dari perubahan lanskap maritim atau justru mampu beradaptasi untuk tampil lebih kuat dan resilient.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dirumuskan bagi pemerintah Indonesia:

1) Akselerasi Pembangunan Hub Maritim Alternatif: Pemerintah harus memprioritaskan dan mempercepat pengembangan pelabuhan di luar koridor Selat Malaka. Pelabuhan Sabang harus ditingkatkan menjadi hub logistik dan layanan maritim terdepan di gerbang barat Indonesia, sementara koridor ALKI II dan III diperkuat melalui modernisasi pelabuhan-pelabuhan seperti Bitung, Makassar, dan Sorong.
2) Peningkatan Pengawasan dan Kapasitas Pertahanan Maritim: Investasi mendesak diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas Maritime Domain Awareness (MDA) oleh TNI AL dan Bakamla, khususnya di perairan Laut Andaman dan sepanjang pesisir barat Sumatra, untuk mengantisipasi perubahan dinamika militer regional.
3) Diplomasi Maritim yang Proaktif: Indonesia harus secara aktif memanfaatkan perubahan ini untuk memperdalam kerja sama keamanan maritim dengan mitra-mitra strategis seperti India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, guna menciptakan perimbangan kekuatan (balance of power) yang sehat di kawasan.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, analisis bersifat

prospektif, karena proyek Thai Canal hingga saat ini masih dalam tahap wacana dan belum terealisasi. Implikasi yang dibahas merupakan proyeksi berdasarkan tren geopolitik saat ini dan dapat berubah seiring waktu. Kedua, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada sumber data terbuka (open-source intelligence) seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan media. Keterbatasan akses terhadap dokumen kebijakan internal atau deliberasi strategis yang bersifat rahasia dapat memengaruhi kedalaman analisis. Ketiga, fokus penelitian ini terbatas pada implikasi geopolitik dan strategis bagi Indonesia, dan tidak mengkaji secara mendalam aspek-aspek lain seperti dampak lingkungan, kelayakan ekonomi-finansial proyek, atau dinamika politik domestik di Thailand.

## DAFTAR REFERENSI

Bateman, S. (2017). The Kra Canal: Another 'Game Changer' for the Regional Maritime Security Environment? RSIS Commentary, No. 165, 1-3.

Boesche, R. (2003). Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India. The Journal of Military History, 67(1), 9–37. https://doi.org/10.1353/jmh.2003.0006

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brewster, D. (2019). The India-Indonesia Maritime Partnership: A Work in Progress. Security Challenges, 15(1), 27–42.

Connelly, A. L. (2020). Sovereignty and the sea: President Joko Widodo's foreign policy challenges. Australian Journal of International Affairs, 74(4), 335–349. https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1756221

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Laksmana, E. A. (2018). The End of Splendid Isolation? The Trump Presidency and the Future of Indonesia's Foreign Policy. Journal of Indo-Pacific Affairs, 1(1), 59-78.

Rahmat, M. Z. (2021). The Kra Canal and the Malacca Dilemma: A geopolitical perspective. Journal of Maritime Studies and National Integration, 5(1), 26-36. https://doi.org/10.14710/jmsni.v5i1.9867

Storey, I. (2020). The Belt and Road Initiative in Southeast Asia: The Case of the China-Laos Railway. Contemporary Southeast Asia, 42(2), 246–271. https://doi.org/10.1355/cs42-2d

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.

Zhao, T. (2021). China's Malacca Dilemma and the Future of the Belt and Road Initiative. Journal of Contemporary China, 30(129), 357-372. https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1802061